Tito Tak Masalah Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK: Rp13 Miliar Buat Amankan Rp1.300 Triliun

Category: Hukum
written by Redaksi | 07/03/2025

ORINEWS.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak masalah dengan laporan yang dibuat masyarakat sipil ke KPK terkait penyelenggaraan retret kepala daerah. Dia menegaskan kegiatan sudah sesuai dengan aturan yang ada.

“Saya berterima kasih yang melaporkan KPK sebagai bentuk pengawasan publik,” ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/3).

Tito memastikan penunjukan langsung PT Lembah Tidar sebagai penyelenggara retret sudah sesuai Pasal 83 Perpres No. 16 Tahun 2018, yang diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021. Semua klasifikasi yang diamanatkan dalam aturan itu memungkinkan penunjukan langsung itu.

Di sisi lain, Tito menegaskan, retret kepala daerah sangat penting untuk mengawal anggaran daerah. Biaya penyelenggaraan retret tidak sebanding dengan nilai APBD yang harus diamankan agar tidak ada lagi pemakaian yang tidak efektif dan efisien.

“Tapi kalau yang utama [retret kepala daerah] menginvestasikan Rp 13 M untuk mengamankan Rp 1.300 T, APBD itu Rp 1.300 T, kalau enggak efisien, kasihan rakyat,” kata Tito

Tito menegaskan, untuk mengamankan APBD sebesar Rp 1.300 T adalah tugas Kemendagri. Selain itu, ia menjelaskan bahwa semula retret direncanakan akan dilaksanakan selama 14 hari.

“Kedua, kegiatan itu sebenarnya 14 hari jadi 7 hari untuk membekali mereka 5 tahun ke depan. Kepala daerah [jumlahnya] 503 dilantik. 103 pernah jadi kepala daerah 400 belum pernah,” ucap dia.

Tito memastikan, semua unsur pengawas sudah turun tangan memastikan penyelenggaraan retret kepala daerah tidak melanggar aturan dan pemakaiannya wajar. Itu pun, pemerintah belum membayar semua biaya penyelenggaraan.

“Saya sudah berkoordinasi dengan LKPP. Nah saya harus sampaikan bahwa biaya belum sepenuhnya dibayarkan Kemendagri. Kita baru panjer, sekitar lebih kurang Rp 13 M, saya sudah cek baru dibayarkan Rp 2 miliaran,” tutur dia.

“Apa yang saya lakukan saya betul-betul Irjen cek betul detail semua penggunaannya semua bill harus wajar. Penunjukan langsung boleh tapi harus wajar penggunaannya,” ucap dia. [source:*kumparan*]